

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN  
DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

**M. AFTI**  
**NIM. 1805906010052**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH, ACEH BARAT  
2023**

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN  
DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi

**M. AFIT**  
**NIM. 1805906010052**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
MEULABOH, ACEH BARAT  
2023**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS EKONOMI  
MEULABOH – ACEH BARAT

Website: [www.utu.ac.id](http://www.utu.ac.id), email: [fekonutu@yahoo.co.id](mailto:fekonutu@yahoo.co.id) Telp (0655) 7023552

Meulaboh, 4 Juli 2023

Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Jenjang : S1 (Strata 1)

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **M. AFIT**  
NIM : 1808906010052

Dengan judul : **Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  
Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Teuku Umar.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

**Mahrizal, S.E., M.Si**  
NIDN. 0118117102

Mengetahui,



**Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M**  
NIP. 196911082002121001

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

**Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si**  
NI PPPK. 19741105 2021211002



Meulaboh, 4 Juli 2023

Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Jenjang : S1 (Strata 1)

### LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **M. AFIT**  
NIM : 1808906010052

Dengan judul : **Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  
Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada tanggal 15 Juni 2023

Menyetujui  
Komisi Ujian

1. Ketua : Mahrizal, S.E., M.Si
2. Sekretaris : Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si
3. Anggota : Yunidar Purnama Sari, S.E., MSi

Tanda Tangan  
.....  
.....  
.....

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

**Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si**  
NI PPPK. 19741105 2021211002

## PERNYATAAN ORISINALITAS

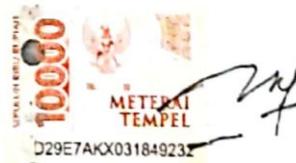
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **M. AFIT**

Nim : 1805906010052

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, Juli 2023  
Saya yang membuat pernyataan



**M. AFIT**  
NIM. 1805906010052



## HALAMAN PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahiim*

*Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu limpahkan kehariban Rasulullah SAW.*

*Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi*

### *Ibunda "Saribanun" Dan Ayahanda "Alm. Muhammad Nur"*

*Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibunda wanita terhebat wanita yang kuat yang telah berjuang sendiri merawat dan menjaga ku dari dalam kandungan hingga aku dewasa, selalu mendoakan yang terbaik untukku dan selalu ada untukku baik dalam keadaan senang maupun susah, semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan umur amin...selanjutnya kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayahanda... kuucapkan terima kasih Ayah yang telah mendoakan yang terbaik untukku walau Ayah sudah tidak bersamaku tapi aku bersyukur dan bahagia karena Ayah dan izin Allah aku ada didunia ini, semoga semua amal ibadah Ayah di terima oleh Allah SWT, aamiin...*

### *Keluarga Tercinta*

*Sebagai tanda terima kasih aku persembahkan karya kecil ini untuk kakak tercinta **Putri Widiyanti, S.Pd** dan **Wardani Ramazan, S.E** dan adik yang paling penulis sayangi yaitu **Muhammad Turfa**, terima kasih telah memberikan semangat, bantuan dan doa. Terima kasih untuk kalian...*

*Terima kasih tiada taranya untuk Bapak **Mahrizal, S.E., M.Si.**, yang senantiasa telah membimbingku dalam penyelesaian Skripsi ini semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak, dan terima kasih ku ucapkan kepada bapak **Dr. Helmi Noviar, S.E., M.Si** dan Ibu **Yunidar Purnama Sari, S.E., Msi.**, selaku dewan penguji yang telah memberikan kritikan dan banyak saran hingga selesainya drama dari skripsi ini.*

*Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi UTU-Meulaboh dan teman-teman seperjuangan lainnya dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terimakasih buat masukan dan dukungannya selama ini. Kebersamaan kita selama ini akan kujadikan memory Indah dalam hidupku...*

*Wassalam*

*M. AFIT, SE*

**BIODATA**



**Data pribadi**

Nama : **M.AFIT**  
Tempat/ Tgl Lahir : Langung, 04 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Email : muhammadafit@gmail.com

**Data Orang tua**

Nama Ayah : Alm. Muhammad Nur  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Saribanun  
Pekerjaan : IRT

**Riwayat Pendidikan**

SD : SD Negeri Langung (Tahun 2005 – 2012)  
SMP : SMP Negeri 2 Meureubo (Tahun 2012 – 2015)  
SMA : SMA Negeri 1 Meureubo (Tahun 2015 – 2018)  
Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar (Tahun 2018 – 2023)

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Kuasanya yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat islam serta nikmat kesehatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis Skripsi yang berjudul “**Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat**” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agardapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai penulis mempersembahkan untuk ayahanda yang telah meninggalkan kami Alm. Muhammad Nur dan ibunda tercinta dan terkasih sepanjang masa Saribanun, serta kakak tercinta Putri Widyanti, S.Pd dan Wardani Ramazan, SE dan adik yang paling penulis sayangi yaitu Muhammad Turfa yang telah memberikan segala bentuk apresiasi serta bentuk pengorbanan, nasehat, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis demi keberhasilan.

2. Kepada Bapak Mahrizal, SE.,M.Si selaku Dosen pemimbing utama yang membimbing, member arahan masukan, motivasi dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
3. Bapak Dr. Helmi Noviar, SE, M.Si selaku ketua program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
4. Bapak. Dr. Hamdi Harmen, SE, MM Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Rektor Dr Ishak Hasan, M. Si selaku Rektor Universitas Teuku umar.
6. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu Pengetahuan selama penulis berada di Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
7. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis disebutkan namanya satu-persatu yang selama ini telah bersama-sama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga amal kebaikan serta keikhlasan ini dapat balasan dari Allah SWT. Dengan demikian yang berlipat ganda dan mudah-mudahan Skripsi ini ada manfaatnya Amin ya Rabbal alamin.

Alue Peunyareng, 4 Juli 2023  
Penulis

**M. AFIT**  
NIM : 1805906010052

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran pendidikan dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat adalah daerah dengan permasalahan keterbatasan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan sangat terbatas. Karena terjadi kegagalan penciptaan lapangan pekerjaan yang baru sehingga tidak sebanding dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Jika pertumbuhan ekonomi tidak di barengi dengan lapangan usaha kesempatan kerja dan kapasitas yang kecil dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya maka akan mempengaruhi adanya tingkat pengangguran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengolah data kuantitatif. Untuk kepentingan penelitian ini digunakan data sekunder melalui metode dokumentasi berupa data tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran pendidikan dan jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2021 yang bersumber dari dokumentasi BPKD dan BPS Kabupaten Aceh Barat. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial APBD dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran, sedangkan anggaran pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. Secara simultan APBD, anggaran pendidikan, jumlah penduduk dan anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat, dengan nilai signifikan ketiga variabel lebih kecil ( $< 0,05$ ).

***Kata Kunci:* APBD, Anggaran Pendidikan, Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), education budget and population on the unemployment rate in West Aceh District. West Aceh District is an area with the problem of limited number of jobs available and very limited. Due to the failure to create new jobs that are not proportional to the level of employment. If economic growth is not accompanied by business fields, employment opportunities and small capacity with a population that always increases every year, it will affect the unemployment rate. The method used in this research is descriptive method by processing quantitative data. For the purposes of this research, secondary data was used through the documentation method in the form of data on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), the education budget and the population on the unemployment rate in West Aceh Regency in 2012-2021 which came from BPKD and BPS Aceh Barat Regency documentation. The data analysis method used is multiple linear regression. The results of this study indicate that partially the APBD and population have an effect on the unemployment rate, while the education budget has no effect on the unemployment positive rate in West Aceh District. Simultaneously APBD, education budget, population and education budget have a positive and significant effect on the unemployment rate in West Aceh District, with a smaller significant value of the three variables ( $<0.05$ ).*

**Keywords: APBD, Education Budget, Total Population, Unemployment Rate.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Keuangan Daerah.....	9
2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah .....	9
2.1.2 Dasar Hukum Keuangan Daerah .....	10
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah .....	10
2.1.4 Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.....	12
2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....	12
2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....	12
2.2.2 Karakteristik dan Fungsi APBD .....	14
2.2.3 Penyusunan dan Penetapan APBD .....	15
2.2.4 Sumber-sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....	18
2.3 Anggaran Pendidikan.....	19
2.4 Pengangguran .....	20
2.4.1 Pengertian Pengangguran .....	20
2.4.2 Jenis Jenis Pengangguran .....	21

2.4.3	Penyebab Terjadi Pengangguran .....	23
2.4.4	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran..	23
2.4.5	Dampak Pengangguran.....	25
2.5	Penelitian Terdahulu .....	26
2.6	Kerangka Pemikiran .....	32
2.7	Perumusan Hipotesis .....	33
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1	Ruang Lingkup Penelitian .....	34
3.2	Data Penelitian.....	35
3.3	Model Analisis Data .....	36
3.6	Definisi Operasional Variabel .....	40
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian .....	42
4.1.1	Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat .....	42
4.1.2	Keadaan Topografi .....	43
4.1.3	Keadaan Penduduk Kabupaten Aceh Barat .....	43
4.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	44
4.2.1	Perkembangan Penggguran di kabupaten Aceh Barat	44
4.2.2	Perkembangan APBD di Kabupaten Aceh Barat ....	46
4.2.3	Perkembangan Anggaran Pendidikan Kabupaten Aceh Barat .....	47
4.2.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat .....	49
4.3	Hasil Pengujian Hipotesis .....	50
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1	Kesimpulan .....	62
3.2	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan ...	43
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 .....	44
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas .....	51
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas .....	52
Tabel 4.5	Hasil Regresi Linear Berganda .....	54
Tabel 4.6	Hasil Koefisien Adjusted R Square .....	55
Tabel 4.7	Hasil Uji t .....	56
Tabel 4.8	Hasil Uji F .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011-2020.....	5
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1	Jumlah Angka Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2021 .....	45
Gambar 4.2	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2021 .....	46
Gambar 4.3	Jumlah Anggaran Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2021 .....	48
Gambar 4.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2021	49
Gambar 4.5	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Input Penelitian Asli Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat .....	68
Lampiran 2	Data Input Penelitian (Log) Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat .....	69
Lampiran 3	Output Data SPSS.....	70
Lampiran 4	Foto Penelitian.....	73
Lampiran 5	Tabel T.....	74
Lampiran 6	Tabel F.....	75



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

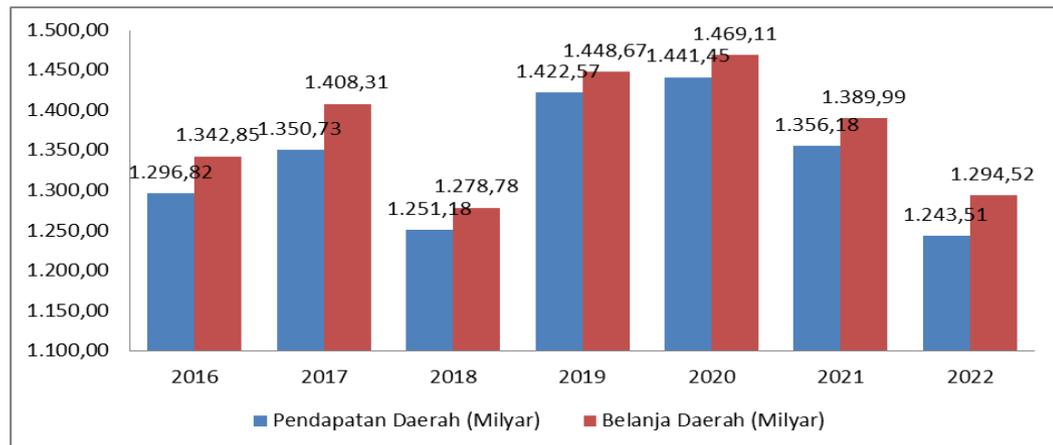
Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami dan sampai saat ini belum bisa untuk di atasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak bekerja berarti tidak mempunyai penghasilan. Hilangnya sumber penghasilan membuka peluang penduduk mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang pada akhirnya mampu membawa mereka kedalam jurang kemiskinan. Pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi yang mengalaminya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran, antara lain pengeluaran pemerintah, pendidikan, dan investasi. Pengeluaran pemerintah, pendidikan, dan investasi memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Indonesia dimana pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki peran untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pendidikan sendiri adalah faktor pendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga dengan semakin banyak terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas maka perusahaan semakin banyak menyerap tenaga kerja, hal ini berdampak baik pada penekanan angka tingkat pengangguran di Indonesia.

Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya dapat dijadikan sumber kekayaan bagi daerahnya. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan kerja, dapat berkembang dalam kegiatan ekonominya, dan dapat menambah pendapatan bagi daerah. Dalam pendapatan tersebut perlu adanya biaya yang akan dikeluarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di suatu daerah otonom memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat demokrasi, adil, pemerataan, dan pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan suara dari masyarakat tersebut. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu dengan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat (Suparmoko, 2014). Indikasi keberhasilan Otonomi Daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik (Kartiwa, 2016). Selain adanya keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi, tujuannya yaitu untuk meningkatkan dan mengatur kestabilan perekonomian adalah dengan adanya peranan pemerintah dalam kebijakan fiskal.

Belum optimalnya pencapaian kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah rendahnya kinerja dari pencapaian kesejahteraan masyarakat pada skala pembangunan daerah (Kusreni dan Suhab, 2019). Hal ini karena masih belum efektif dan rendahnya alokasi dana pada setiap daerah. Seperti yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat adalah alokasi belanja daerah yang masih sangat kecil, pembiayaan yang dilakukan untuk daerah juga masih sangat kecil sehingga menyebabkan pembangunan yang kurang optimal di tingkat daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Barat dirancang dan disusun dengan kinerja yang memuat sasaran yang diharapkan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat 2022

### **Grafik 1.1** **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat** **Tahun 2016-2022**

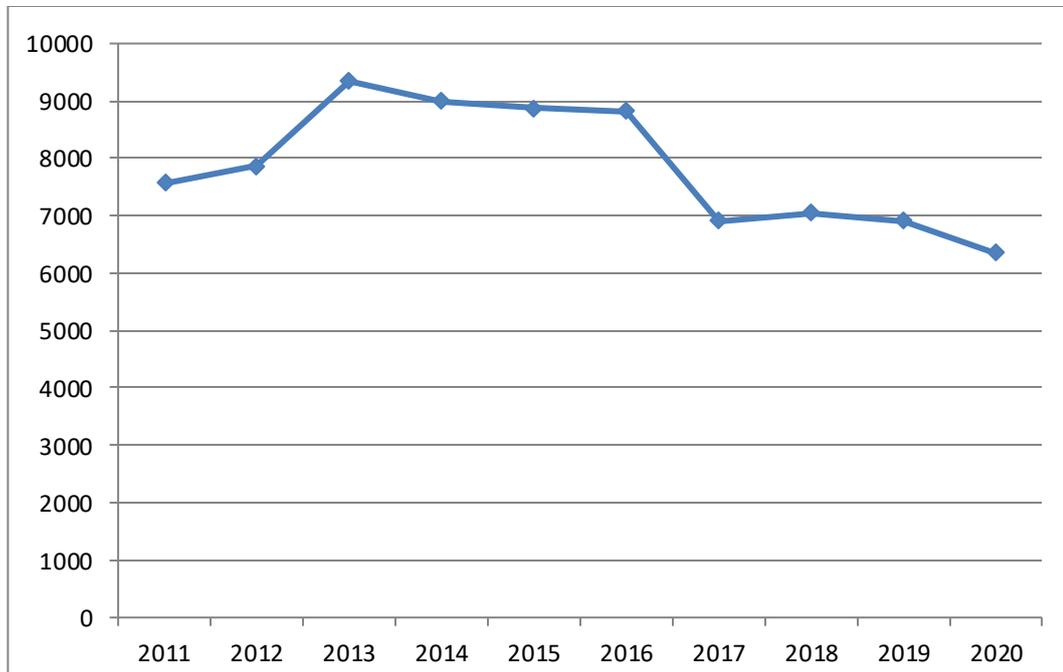
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa anggaran lebih besar anggaran belanja daerah dari pada pendapatan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Belanja daerah yang tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp 1.469,11 Milyar dengan pendapatannya adalah sebesar Rp 1.441,45 Milyar. Sedangkan belanja daerah yang paling sedikit terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar Rp

1.278,78 Milyar dengan pendapatannya adalah sebesar Rp 1.251,18 Milyar. Terjadinya grafik turun naik pada pendapatan daerah dan belanja daerah menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, sehingga tercipta kesempatan kerja yang tinggi.

Peningkatan jumlah pengeluaran pemerintah seharusnya dapat berdampak baik pada penekanan tingkat pengangguran, dimana pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong kegiatan serta pengembangan kegiatan yang menyerap tenaga kerja lebih tinggi seperti industri manufaktur, perdagangan dan jasa. Lapangan pekerjaan yang tersedia karena adanya aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran, pengeluaran pemerintah yang tidak tepat sasaran, contohnya adalah pengeluaran pemerintah yang lebih banyak ditujukan untuk membiayai proyek-proyek padat modal sehingga pengeluaran pemerintah tidak tepat sasaran dan tingkat pengangguran terbuka setiap tahunnya terus bertambah

Faktor pendidikan memiliki peranan yang penting terhadap pengangguran. Dimana apabila pendidikan suatu masyarakat rendah dapat berakibat pada meningkatnya tingkat pengangguran di negara tersebut. Demikian pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, skill dan keahlian. Kabupaten Aceh Barat adalah daerah dengan permasalahan keterbatasan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan sangat terbatas. Karena terjadi kegagalan penciptaan lapangan pekerjaan yang baru sehingga tidak sebanding dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Selain tingkat peluang kerja yang sangat sedikit sehingga menyebabkan tingkat

pengangguran setiap tahunnya meningkat pesat dan semakin membuat masyarakat hidup dalam kondisi terpuruk dan taraf hidup kebawah.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat 2021

**Grafik 1.2**  
**Jumlah Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh barat**  
**Tahun 2011-2020**

Berdasarkan Grafik 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pengangguran di Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2011-2020 mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun angka pengangguran di Kabupaten Aceh Barat sebesar 7.568 jiwa. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan pada angka pengangguran 7.872 jiwa. Kemudian pada tahun 2013 naik kembali menjadi 9.342 jiwa. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 8.987. Pada tahun 2015-2016 angka pengangguran sebesar 8.878 jiwa dan 8.823 jiwa. Sedangkan pada tahun 2017 turun kembali menginjak angka pengangguran sebesar 6.913 jiwa. pada tahun 2018 terjadi kenaikan pengangguran dengan angka 7.046 jiwa. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan angka pengangguran yaitu 6.909 jiwa. Sedangkan

pada tahun 2020 terjadi kembali penurunan angka pengangguran yaitu sebesar 6.452 jiwa. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penanggulangan pengangguran yang tepat di Aceh Barat. Badan Pusat Statistik (BPS, 2021).

Kabupaten Aceh Barat dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan UU No.1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara, pengolahan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah (Jurnal laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah).

Jika pertumbuhan ekonomi tidak di barengi dengan lapangan usaha kesempatan kerja dan kapasitas yang kecil dengan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya maka akan mempengaruhi adanya tingkat pengangguran karena dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa di perlukan suatu kebijakan yang tepat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) suatu daerah, sehingga alokasi anggaran untuk setiap kegiatan lebih terarah, efektif dan efisien. Adapun kebijakan yang dimaksimalkan adalah sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip tertentu untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang harus dibuat. Disusun dan dilaksanakan secara besar dan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dari uraian penulis di atas maka peneliti membuat judul **“Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Aceh Barat.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah anggaran pendapatan dan belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat?
2. Apakah anggaran pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, adapun manfaat penelitian ini berupa teoritis dan praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru sebagai sarana pembelajaran dan penerapan ilmu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada semua pihak baik kalangan praktis maupun pihak lainnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi Kalangan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dan informasi tentang analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Bab Pertama, pembahasan tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah tinjauan pustaka yaitu menguraikan tentang penelitian terdahulu dan memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian.

Bab Ketiga adalah penelitian merupakan bab yang berisi tentang ruang lingkup penelitian, data penelitian, model penelitian, hasil pengujian hipotesis dan definisi operasional variabel.

Bab Keempat adalah berisi tentang hasil dan pembahasan yang didalamnya dijelaskan mengenai deskripsi lokasi penelitian, variabel penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran yang di ambil dari keseluruhan hasil penelitian serta saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUATAKA**

#### **2.1 Keuangan Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Yasin, et. Al, (2017), Keuangan daerah merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengelola daerah mulai dari merencanakan mengawasi, mengendalikan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya untuk rangka pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, untuk membantu di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah didefinisikan “sebagai hak semua dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.”

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 Ruang lingkup keuangan daerah antara lain:

1. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan atas pinjaman dari pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan daerah atau kepentingan umum.

### **2.1.2 Dasar Hukum Keuangan Daerah**

Dasar hukum keuangan daerah yaitu:

1. UU 17/2003 : Keuangan daerah
2. UU 1/2004 : Pebendaharaan negara
3. PP 71/2010 : Standar akuntansi pemerintah
4. UU 1/2015 : Pemerintah daerah
5. PP 71/2019 : Pengelolaan Keuangan
6. Pemandagri 77/2020 : Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
7. UU 1/2022 : Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

### **2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Acuan dalam sistem pengelolaan daerah, meliputi pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja dilihat dari besar porsi anggaran tetapi juga pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Kejelasan mengenai misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya (Karianga, 2017). Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sama kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Khusnai (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang memiliki jabatan mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 secara jelas menetapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan yaitu:

1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

3. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
4. Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

#### **2.1.4 Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah**

Dalam PP No 105 tahun 2000 pasal 1 ayat (4) tentang pertanggung jawaban keuangan daerah menyatakan bahwa pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala daerah menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang terdiri atas:

1. Laporan perhitungan APBD
2. Nota Perhitungan APBD
3. Laporan Aliran kas
4. Neraca Daerah.

## **2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

### **2.2.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan

terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut. Penganggaran publik merupakan pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap outcomes anggaran. Penentuan anggaran membutuhkan kesepakatan atas tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan kesepakatan tentang bagaimana pencapaian tujuan-tujuan tersebut, sehingga anggaran merupakan hasil kesepakatan antara dua pihak, yakni eksekutif dan legislatif (Abdullah, 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (Yasin, et. Al., 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 pasal 1 ayat 8 tentang keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dalam peraturan pemerintah No. 55 tahun 2005 pasal 1 ayat 7 tentang Dana Perimbangan. APBD adalah rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian APBD juga terdapat PP No. 58 tahun 2005 pasal 20 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa APBD

merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (a) Pendapatan daerah, (b) Belanja daerah, (c) Pembiayaan daerah.

## **2.2.2 Karakteristik dan Fungsi APBD**

### **2.2.2.1 Karakteristik APBD**

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun oleh dewan perwakilan rakyat (DPRD) bersama kepala daerah.
2. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan tradisional (line item) yaitu anggaran yang disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap bisnis dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.

### **2.2.2.2 Fungsi APBD**

Berdasarkan peraturan pemendagri No.13 tahun 2006, fungsi-fungsi APBD adalah:

- a. Fungsi otoritas, APBD sebagai standar untuk melakukan pendapatan dan belanja di tahun tersebut
- b. Fungsi perencanaan, APBD sebagai acuan bagi pemerintah dalam merancang kegiatan ditahun tersebut.
- c. Fungsi pengawasan, APBD sebagai acuan untuk mengukur apakah penyelenggaraan kegiatan pemerintah telah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan.

- d. Fungsi alokasi, APBD wajib dikelola untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru atau mengurangi angka pengangguran, mencegah penghamburan sumber daya serta meningkatkan efisiensi perekonomian
- e. Fungsi distribusi, APBD wajib memperhatikan rasa kesejahteraan, keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitas, APBD sebagai alat untuk berusaha menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang.

### **2.2.3 Penyusunan dan Penetapan APBD**

Menurut UU No 17 tahun 2003 BAB IV pasal 16 penyusunan dan penetapan APBD sebagai berikut:

- 1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.
- 2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.
- 3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah dan perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Menurut UU No 17 Tahun 2003 BAB IV pasal 17, penyusunan dan penetapan APBD sebagai berikut:

- 1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- 2) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

- 3) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
- 4) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.

Menurut UUN No 17 Tahun 2003 BAB IV pasal 18, penyusunan dan penetapan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja Pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan juni tahun berjalan.
- 2) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- 3) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap kerja perangkat daerah.

Menurut UUN No 17 tahun 2003 BAB IV pasal 19, penyusunan dan penetapan APBD sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun berikutnya.
- 2) Rencana kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

- 3) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
- 4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- 5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Menurut UUN No 17 Tahun 2003 BAB IV pasal 20, penyusunan dan penetapan APBD sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- 3) DPRD dapat mengajukan usai yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- 5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- 6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

#### **2.2.4 Sumber-sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut UU No 33 Tahun 2004 adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain penerimaan yang sah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat dilihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Wulandari dan Iryanie, 2017).

Berdasarkan Saraswati (2018), dana perimbangan merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, dana perimbangan memiliki peranan yang sangat penting bagi keuangan daerah, terutama dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

### 2.3 Anggaran Pendidikan

Menurut Rusfandi (2019), “Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana terinci dalam Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terbagi atas tiga kelompok pos anggaran. Pertama, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat. Kedua, anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa”. Adapun pengertian anggaran pendidikan menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat 39 mendefinisikan bahwa : Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Menurut Armida (2014), anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan system yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan (fiskal), serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan. Menurut Armida (2014) mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga pengertian tentang anggaran pendidikan:

Pertama, anggaran untuk sector pendidikan. Selain untuk anggaran pendidikan masyarakat umum, dalam pengertian ini juga termasuk pendidikan

yang diselenggarakan oleh departemen lain selain Depdiknas. Kedua, anggaran Depdiknas yaitu anggaran pendidikan nasional yakni semua anggaran pendidikan nasional. Ketiga, yakni semua anggaran pendidikan di semua departemen, termasuk anggaran rutin untuk gaji PNS dan biaya rutin operasional lembaga.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai anggaran pendidikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa anggaran pendidikan merupakan sistem anggaran yang disediakan pemerintah untuk keperluan belanja di bidang pendidikan sesuai kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat dipergunakan untuk membangun pendidikan yang berkualitas. Sesuai amanat undang-undang, selain Kemendikbud, anggaran pendidikan turut dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga lainnya yang menjalankan fungsi pendidikan, seperti Kementerian Agama (Kemenag). Sejalan dengan itu, Undang-undang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan ditransfer ke daerah secara langsung. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam APBN 2021, alokasi untuk anggaran pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya sebesar 20% (Ali, et.al, 2021).

## **2.4 Pengangguran**

### **2.4.1 Pengertian Pengangguran**

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidak keseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan

melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2013).

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), dalam indikator keternagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan pendapat di atas maka bisa disimpulkan bahwa pengangguran adalah orang yang tidak mau bekerja sama sekali, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak, maupun orang yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

#### **2.4.2 Jenis Jenis Pengangguran**

Menurut Sukirno (2013), dalam membedakan pengangguran, terdapat dua cara untuk mengolompokkannya, yaitu;

1. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya
  - a. Pengangguran normal atau friksional adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara lowongan pekerjaan dengan pencari kerja.
  - b. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat dari imbas naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada pencari kerja.
  - c. Pengangguran suktural (*structural unemployment*) adalah keadaan dimana pengangguran yang sedang mencari pekerjaan tidak mampu

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan pekerjaan.

d. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pengantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin.

2. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya

a. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*).

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh- sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

b. Pengangguran terselubung atau tersembunyi (*Disguised Unemployment*)

Pengangguran terselubung atau tersembunyi adalah tenaga kerja yang tidak bekerja tertentu, misal pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.

c. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*)

Pengangguran Musiman keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur.

d. Setengah Menganggur (*under Unemployment*).

Pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah pengangguran ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

### **2.4.3 Penyebab Terjadi Pengangguran**

Berdasarkan Ishak (2018), faktor penyebab terjadi pengangguran:

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan di negara Indonesia.
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
3. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga pekerja.
4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan dikota, dan sedikitnya peralatan lapangan pekerjaan.
5. Masih belum maksimal upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.

### **2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran**

#### **1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh dewan Perwakilan Rakyat, Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan

produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Santoso 2021).

## **2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Berdasarkan Fauziyah dan Nona (2021) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah. Salah satu fungsi APBD adalah fungsi alokasi bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.

## **3. Jumlah penduduk**

Pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan jumlah penduduk mengakibatkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Akan tetapi kenaikan jumlah angkatan tidak dibarengi oleh meningkatnya kesempatan kerja, maka akan mengakibatkan angkatan kerja yang jumlahnya bertambah tersebut tidak dapat didistribusikan ke lapangan pekerjaan. Hal ini bisa berdampak pada jumlah pengangguran yang terus bertambah.

#### **4. Produktivitas tenaga kerja**

Menurut Zulhanafi (2013) produktivitas akan mengalami peningkatan manakala penggunaan terhadap tenaga kerja mengalami peningkatan. Peningkatan penggunaan tenaga kerja akan menurunkan jumlah pengangguran, begitu juga sebaliknya, apabila produktivitas mengalami penurunan maka penggunaan terhadap tenaga kerja juga akan mengalami penurunan.

##### **2.4.5 Dampak Pengangguran**

Menurut Franita (2016) dampak dari pengangguran berimbas pada menurunnya tingkat perekonomian negara, berdampak pada ketidakstabilan politik, berdampak pada para investor, dan pada sosial mental. Banyak sekali dampak ditimbulkan dari pengangguran. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran yaitu:

- 1) Ditinjau dari segi ekonomi pengangguran akan meningkatkan jumlah kemiskinan. Karena banyak yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka. Sementara biaya hidup terus berjalan. Ini akan membuat mereka tidak dapat mandiri dalam menghasilkan finansial untuk kebutuhan hidup para pengangguran.
- 2) Ditinjau dari segi sosial, dengan banyaknya pengangguran yang tnerjadi maka akan meningkatnya jumlah kemiskinan, dan banyak pengemis, gelandangan, serta pengamen. Yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal, karena sulitnya mencari pekerjaan, maka banyak orang melakukan tingkat kejahatan seperti mencuri, merampok, dan lain-lain untuk memenuhi kehidupan mereka.

- 3) Ditinjau dari segi mental, dengan banyaknya pengangguran maka rendahnya kepercayaan diri, keputusan asa, dan akan menimbulkan depresi.
- 4) Ditinjau dari segi politik maka akan banyak demonstrasi yang terjadi. Yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil, banyaknya demonstrasi para serikat kerja karena banyaknya pengangguran yang terjadi.
- 5) Ditinjau dari segi keamanan, banyaknya pengangguran membuat para penganggur melakukan tindak kejahatan demi menghidupi perekonomiannya, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, tindak penipuan.
- 6) Banyak pengangguran juga dapat meningkatkan pekerja seks komersial dikalangan muda, karena demi menghidupi ekonominya.
- 7) Banyaknya dampak pengangguran yang timbul, menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk segera menanggulangi jumlah pengangguran yang terjadi. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap daerah harus mampu mandiri meningkatkan laju perekonomiannya.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Suprato (2016)	Analisis anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kutai	Metode yang digunakan metode analisis deskriptif	Hasil penelitian dari tahun 2010 sampai tahun 2014 menunjukkan dari empat rasio yang

		Kartanegara tahun 2010 sampai 2014.	pendapatan dalam APBD dianalisa melalau Rasio Perkapita, Ruang fiscal, dan Rasio ketergantungan Daerah.	digunakan tiga rasio yaitu mengalami perbaikan sedangkan ruang fiscal justru mengalami penurunan.
2	Laily Chodariyanti (2016).	Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Jember.	Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan data sekunder. alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis trend dan korelasi bivariat.	Hasil analisis jawaban yang diperoleh bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember akan meningkat sementara korelasi antara Pemerintah Kabupaten Jember menghabiskan dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jember sangat kuat dan langsung.
3	Nurhidayah dan Hendikawati (2018).	Pengaruh Realisasi APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Statistical Mediation Analysis.	Metode analisis jalur (path analysis) model mediasi (Statistical Mediation Analysis) dengan bantuan paket program LISREL.	. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung positif A PAD dan DAK berpengaruh langsung positif terhadap pertumbuhan ekonomi berturut-turut sebesar 0,28 dan 0,38, sedangkan DAU dan Belanja Pembangunan tidak signifikan berpengaruh langsung positif terhadap

				<p>pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu, tidak terdapat pengaruh langsung positif pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. langsung positif terhadap kemiskinan.</p>
4	Zakaria, (2018)	<p>Analisis Pengaruh Apbd Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>Metode penentuan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan fasilitas program SPSS versi 21.</p>	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, dan SILPA tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan untuk PDRB per kapita dan Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.</p>
5	Sinambela, et al (2018)	<p>Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara.</p>	<p>Metode yang digunakan <i>research and development (R&amp;D)</i>.</p>	<p>Hasi Penelitian ini menemukan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Utara belum efektif dan efisien terlihat dari APBD yang menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja belum dapat</p>

				mencapai target.
6	Nurulita, et.al (2018)	Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan aerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau.	Metode analisis Jalur.	Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara rasio kemandirian dan rasio efektivitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.
7.	Kaharudin, et. al, (2019)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017).	Kuantitatif melalui analisis regresi berganda	Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pengangguran, variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kota Manado. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa penelitian variabel ini sudah memiliki pengaruh. Akan tetapi pengaruhnya secara simultan dapat dikategorikan masih rendah, karena hasil perhitungan menunjukkan koefisien determinasi berada dibawah angka yang seharusnya. Dari hasil uji asumsi klasik dapat

				diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah pada uji autokorelasi juga diperoleh hasil tidak ada masalah autokorelasi pada model dalam 2 penelitian akan tetapi dalam penelitian tentang kemiskinan terdapat masalah autokorelasi. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai faktor yang seringkali mempengaruhi keadaan di masyarakat
8.	Rotinsulu, et. AL, (2019).	Analisi Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Di Sulawaesi Utara	Analisi regresi linier Uji F Uji T Koefisien determinasi ( $R^2$ ).	Kesimpulan dari penelitian 1. Di kota Manado alokasi (APBD) tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun tiap tahun anggaran terus menerus meningkat. 2. Di kota Bitung Pengaruh APBD terhadap perekonomian masi amat besar berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil baik pertumbuhan, ekonomi, pengangguran maupun tingkat kemiskinan. 3. Di Mahanasa

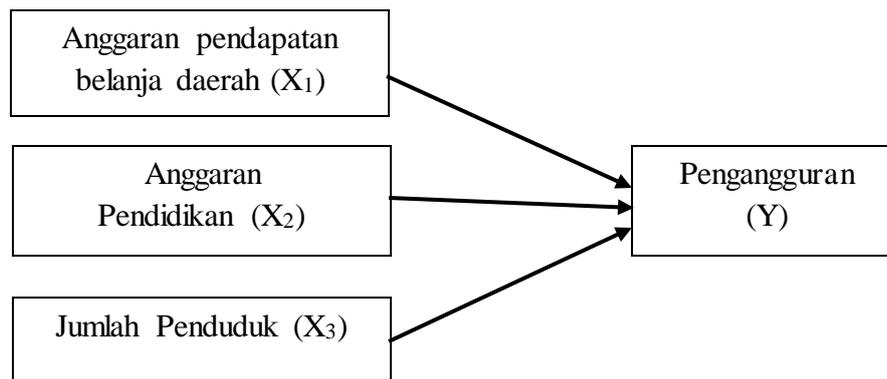
				<p>APBD tidak memberi pengaruh baik dalam pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran angka kemiskinan.</p> <p>4. Di kabupaten Bolang Mongondouw alokasi anggaran APBD member kontribusi positif pada perekonomian terutama dalam menaikkan angka pertumbuhan ekonomi, namun kurang member pengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, serta angka pengangguran yang ada di bolang Mongondouw.</p>
9	Ali, et. Al., (2021).	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Pengangguran. Sehingga dalam pengangguran alokasi dan belum memaksimalkan untuk mengelola dan mengoptimalkan

				sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi maupun menekan tingkat pengangguran.
10	Lamaya dan Mei (2021).	Pengaruh realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten flores timur.	Analisis Statistik Inferensia Regresi Linier Bergandamel alui bantuan program SPSS 19.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung $0.05$ $3,444 >$ ttabel $1,859.$ , maka sesuai analisis coeficients, secara parsial keputusan yang diambil adalah Pendapatan Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Daerah Kabupaten Flores Timur.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kerangka berpikir menggambarkan pengaruh antara variabel yaitu pengangguran di Aceh Barat dan variabel indenpenden yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Aceh Barat.

Untuk mempermudah penjelasan dari uraian di atas maka penulis menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

## **2.7 Perumusan Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan, prediksi, atau jawaban sementara dari suatu permasalahan (Sujarweni, 2015). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha<sub>1</sub> : Diduga ada pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

Ha<sub>2</sub> : Diduga ada pengaruh anggaran pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

Ha<sub>3</sub> : Diduga ada pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2012-2021. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data menganalisis dan menginterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggali data yang bersumber dari BPKD dan BPS Kabupaten Aceh Barat. Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

## **3.2 Data Penelitian**

### **3.2.1 Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPKD dan BPS Kabupaten Aceh Barat. Di samping itu juga dilakukan penelaahan melalui jurnal dan literatur yang berhubungan dengan masalah di atas untuk memperoleh informasi ilmiah yang menyangkut dengan dasar-dasar teoritis yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data berkala (*time series*) dengan kurun waktu sepuluh (10) tahun, yaitu tahun 2012 sampai 2021, yaitu data tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran pendidikan, jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat.

### **3.2.2 Teknik Pengumpulan Data**

Suatu penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor yang cukup penting yang mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini dikarenakan dengan pemilihan metode yang tepat, maka akan diperoleh data yang tepat, relevan, dan akurat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan cara:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, buku bacaan, jurnal, artikel, serta laporan-laporan penelitian ilmiah yang ada hubungannya dengan topik yang diteliti.

## 2. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Untuk kepentingan penelitian ini digunakan data sekunder melalui metode dokumentasi berupa data tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendidikan dan jumlah penduduk pada tahun 2012 hingga tahun 2021 yang bersumber dari dokumentasi BPKD dan BPS Kabupaten Aceh Barat.

### 3.3 Model Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa kuantitatif yaitu dengan suatu model untuk mengukur APBD, anggaran pendidikan dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif (Sugiyono, 2017). Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogrovsmirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang

digunakan. Uji *kolmogrovsmirnov* adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.

- 1) Jika  $\text{Sig} > 0,05$  maka data berdistribusi normal
- 2) Jika  $\text{Sig} < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal (Sujarweni, 2015).

b. Uji Multikolinearitas

Sujarweni (2015), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factory*) dan *tolerance* pada masing-masing variabel bebasnya. Jika nilai VIF  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$  maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Sujarweni (2015), uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Cara menganalisis asumsi heteroskedastisitas dengan melihat grafik *scatter plot* dimana jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan adanya Heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas titik-titiknya menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.

## 2. Uji Hipotesis

### a. Regresi Linear Berganda

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi, yaitu menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi atau memproduksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang diketahui.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

$$TP = \alpha + \beta_1 APBD + \beta_2 APdk + \beta_3 JP + \varepsilon \quad \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat atau variabel TP (pengangguran)

$\alpha$  = Nilai Konstanta ( Intercept)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi berganda

APBD = Variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APdk = Variabel Anggaran Pendidikan

JP = Variabel Jumlah penduduk

$\varepsilon$  = *Error term*

### b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam

menjelaskan variasi perubahan dalam variabel terganggunya. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model di dalam menerangkan variasi variabel dependen nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Sifat-sifat koefisien determinasi adalah:

- 1) Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1.
- 2) Koefisien determinasi sama dengan 0 berarti variabel dependen tidak dapat ditafsirkan oleh variabel independen.
- 3) Koefisien determinasi sama dengan 1 atau 100% berarti variabel dependen dapat ditafsirkan oleh variabel independen secara sempurna tanpa ada error.
- 4) Nilai koefisien determinasi bergerak antara 0 sampai dengan 1 mengindikasikan bahwa variabel dependen dapat diprediksikan (Suliyanto, 2016).

c. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau dependen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,005 ( $\alpha = 5\%$ ). Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

$H_{a1}$  : Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai sig  $< \alpha$  maka artinya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

$H_{a2}$  : Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai sig  $< \alpha$  maka artinya, anggaran

pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

$H_{a3}$  : Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha$  maka artinya, jumlah penduduk secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

d. Uji Signifikan Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik f sering disebut dengan uji model. Nilai yang digunakan untuk melakukan uji model adalah nilai F hitung. Uji F yang signifikan menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dijelaskan sekian persen oleh variabel independen secara bersamaan adalah nyata dan bukan karena kebetulan (Suliyanto, 2016). Uji  $F_{hitung}$  (Uji serentak) dilakukan untuk melihat secara bersama-sama apakah terdapat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Model hipotesis yang digunakan dalam uji  $F_{hitung}$  ini adalah:

Nilai  $F_{hitung}$  akan dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$ . Kriteria pengambilan keputusan yaitu:

$H_0$  diterima bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$

$H_a$  diterima bila  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , pada  $\alpha = 5\%$ .

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti membatasi penelitian untuk melihat identifikasi yang mempengaruhi tingkat pengangguran Kabupaten Aceh Barat, yaitu:

1. Tingkat Pengangguran ( $Y$ ) adalah semua angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum menemukan pekerjaan di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2012-2021 yang diukur dalam satuan (Jiwa).
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( $X_1$ ) adalah keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dilihat dari tahun 2012-2021 yang dihitung dalam rupiah (Rupiah). APBD juga merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Dimana APBD termasuk belanja daerah dan pendapatan daerah seperti kebutuhan untuk pendidikan dan pelatihan atau seperti adanya UMKM yang dapat mendorong pendapatan daerah yang termasuk dalam APBD.
3. Anggaran pendidikan ( $X_2$ ) merupakan alokasi anggaran belanja pada sektor pendidikan untuk membangun sarana dan prasarana guna melakukan investasi dalam bentuk modal manusia. Anggaran pendidikan ini dilihat dari tahun 2012-2021 yang dihitung dalam rupiah (Rupiah).
4. Jumlah Penduduk ( $X_3$ ) merupakan jumlah penduduk pada tahun tertentu yang dinyatakan dalam satuan jiwa, dengan periode waktu yang digunakan yakni tahun 2012 hingga tahun 2021.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat**

Kabupaten Aceh Barat dengan ibu kota Meulaboh memiliki luas wilayah sebesar 292.795 Ha atau 2.927,95 km<sup>2</sup> yang di dasari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang terletak pada geografis 04°06 – 04°47 Lintang dan 95°52 – 96°30 Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie
- b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Nagan Raya
- d. Sebelah Barat : Samudera Indonesia.

Dengan luas wilayah 2.927,95 Km<sup>2</sup> Kabupaten Aceh Barat, secara topografis, sebagian besar desa-desanya merupakan wilayah daratan yaitu 233 desa (72,59%). Sisanya merupakan wilayah pantai, lembah dan lereng, terdiri dari 12 kecamatan antara lain : Johan Pahlawan, Pante Ceureumen, Kaway XVI, Pantan Reu, Sungai Mas, Woyla Arongan Lambalek, Samatiga, Bubon, Meulaboh, Woyla Timur, Woyla Barat. Data luas masing-masing kecamatan dan wilayah Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1: Luas Wilayah Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Distribusi (Persen)
1.	Johan Pahlawan	44,91	1,53
2.	Samatiga	140,69	4,81
3.	Bubon	129,58	4,43
4.	Arongan Lambalek	130,06	4,44
5.	Woyla	249,04	8,51
6.	Woyla Barat	123,00	4,20
7.	Woyla Timur	132,60	4,53
8.	Kaway XVI	427,09	14,87
9.	Panton Rheu	83,09	2,83
10.	Meureubo	112,87	3,85
11.	Pante Ceureumen	490,25	16,74
12.	Sungai Mas	864,77	29,53
<b>Jumlah</b>		<b>2.927,95</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data BPS Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka Tahun 2023

#### 4.1.2 Keadaan Topografi

Wilayah Kabupaten Aceh Barat sebagian besar merupakan wilayah dataran berada pada ketinggian 0 – 500 meter dpl dan sebagian lagi berada di atas 500 meter dpl. Daerah perbukitan dan pegunungan yang memiliki ketinggian di atas 1500 meter dpl terdapat di Kecamatan Sungai Mas yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pidie.

Berdasarkan tingkat kelerengannya, sebagian besar kondisi wilayah Kabupaten Aceh Barat merupakan lahan datar dengan kelerengan 0 – 8% dan datar bergelombang 8 – 25%, sedangkan wilayah terjal berada pada nilai kelerengan 25 – 40%. Daerah yang mempunyai kelerengan di atas 40 % hanya terdapat di Kecamatan Sungai Mas seluas 31.119 ha.

#### 4.1.3 Keadaan Penduduk Kabupaten Aceh Barat

Penduduk Kabupaten Aceh Barat terdiri dari berbagai suku bangsa yang telah mengalami asimilasi dalam kurun waktu yang cukup lama. Rincian jumlah

penduduk Kabupaten Aceh Barat berdasarkan jenis kelamin menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Johan Pahlawan	32.603	32.043	64.646
2.	Samatiga	7.909	7.747	15.656
3.	Bubon	3.409	3.408	6.817
4.	Arongan Lambalek	6.058	5.813	11.871
5.	Woyla	6.792	6.784	13.576
6.	Woyla Barat	3.952	3.885	7.837
7.	Woyla Timur	2.583	2.561	5.144
8.	Kaway XVI	10.634	10.582	21.216
9.	Panton Rheu	15.426	14.640	30.066
10.	Meureubo	5.624	5.509	11.133
11.	Pante Ceureumen	3.352	3.234	6.586
12.	Sungai Mas	2.150	2.038	4.188
<b>Total</b>		<b>100.492</b>	<b>98.244</b>	<b>198.736</b>

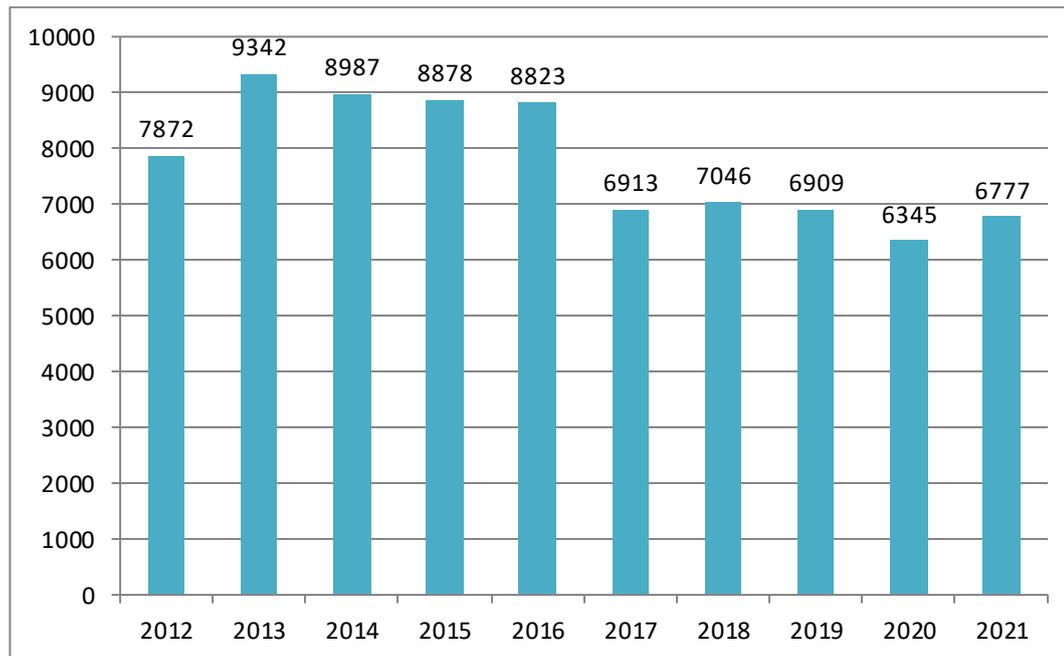
Sumber : Data BPS Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 adalah 198.736 jiwa yang terdiri dari laki-laki 100.492 jiwa dan perempuan 98.244 jiwa.

## 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

### 4.2.1 Perkembangan Pengangguran di kabupaten Aceh Barat

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan. Berikut ini adalah data jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh barat berdasarkan data yang di peroleh dari dinas Badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat dalam kurun Waktu 2012 – 2021.



Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat (2023)

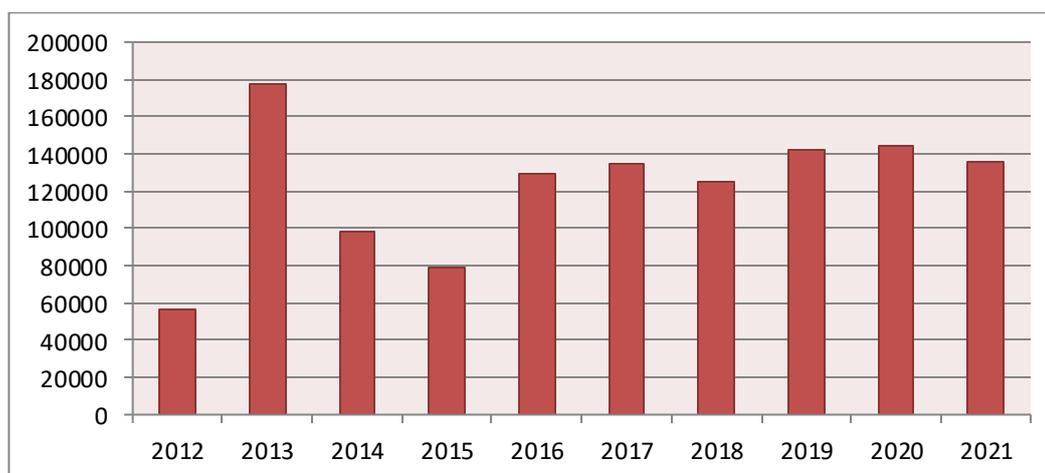
**Grafik 4.1: Jumlah Angka Pengangguran (Jiwa) di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2021**

Berdasarkan Grafik di atas 4.1 dapat dilihat bahwa pengangguran di Kabupaten Aceh Barat dari Tahun 2012-2013 pengangguran di Kabupaten Aceh Barat sebesar 9.342 jiwa dikarenakan banyaknya lulusan SLTA dan perguruan Tinggi yang memasuki usia kerja tapi sehingga bertambahnya jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2014 -2017 jumlah pengangguran di Kabupaten Aceh Barat kembali mengalami penurunan sebesar 6.913 jiwa, dan kembali mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 6.909 jiwa. Dan pada tahun 2020 angka pengangguran mengalami penurunan yaitu 6.345 jiwa sedangkan pada tahun 2021 Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat kembali mengalami kenaikan kembali yaitu 6.777 jiwa. Hal ini disebabkan karena adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru sehingga pengangguran dapat terserap.

#### 4.2.2 Perkembangan APBD di Kabupaten Aceh Barat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. APBD yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Adapun APBD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah APBD belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut ini data jumlah APBD di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2012- 2021.



Sumber : Dinas BPKD Kabupaten Aceh Barat (2023)

**Grafik 4.2 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Rupiah) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2021**

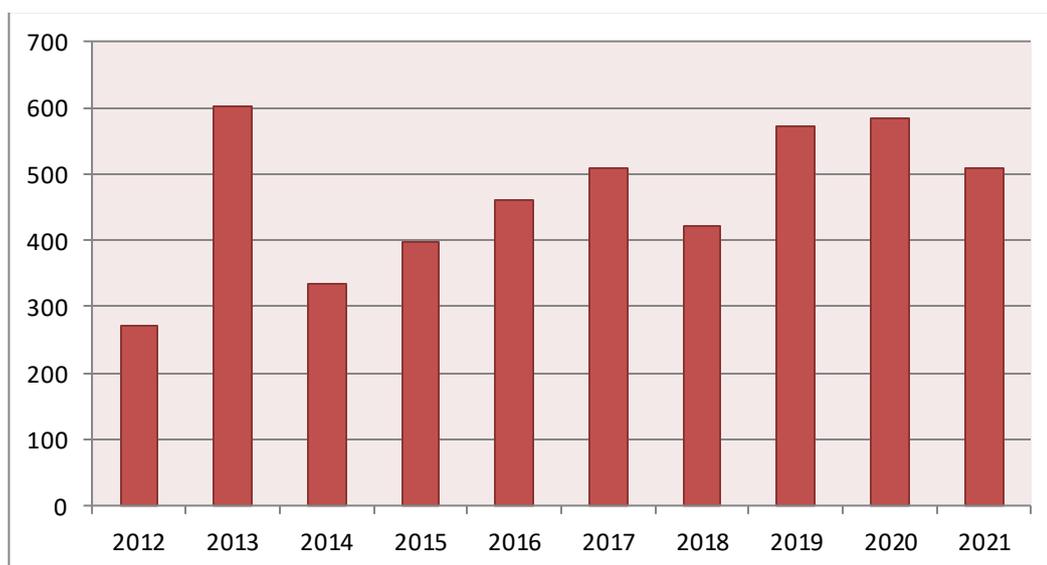
Berdasarkan Grafik 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah APBD di Kabupaten Aceh Barat mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, tergantung pada roda perputaran ekonomi pada setiap tahunnya. Jika terjadi kenaikan artinya ekonomi sedang mengalami pertumbuhan sebaliknya, jika nilai pendapatan menurun artinya ekonomi sedang berkontraksi. APBD di kabupaten Aceh Barat masih mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap tahun, dimana peningkatan dan penurunan tersebut akan memberikan gambaran bahwa pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat masih berjalan dengan baik serta masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolalaannya. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2012 jumlah APBD dikabupaten Aceh Barat berjumlah 566,75 Juta dan pada Tahun 2013 jumlah APBD di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 1.263,77 Juta dan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 987,28,- Juta dan pada tahun 2015 sebesar 719,48 Juta sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1.296,82 Juta dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 1.350,73 Juta dan pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 1.251,18 Juta kemudian pada tahun 2019 terjadi kenaikan kembali pada tahun 2019 sebesar 1.422,57 Juta dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 1.441,45 Juta dan pada tahun 2021 penurunan kembali. 1.356,18 Juta dan terjadi kenaikan kembali APBD di Kabupaten Aceh Barat disebabkan karena ada faktor perekonomian yang mengalami peningkatan dan penurunan terutama di sektor pajak barang dan jasa.

#### **4.2.3 Perkembangan Anggaran Pendidikan Kabupaten Aceh Barat**

Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan system yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang

direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan (fiscal), serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan. Ada dua bagian dalam penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran.

Adapun anggaran pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggaran dari sektor pendidikan yang telah direalisasikan di Kabupaten Aceh Barat. Berikut ini data jumlah anggaran pendidikan di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2012-2021.



Sumber : Dinas BPKD Kabupaten Aceh Barat (2023)

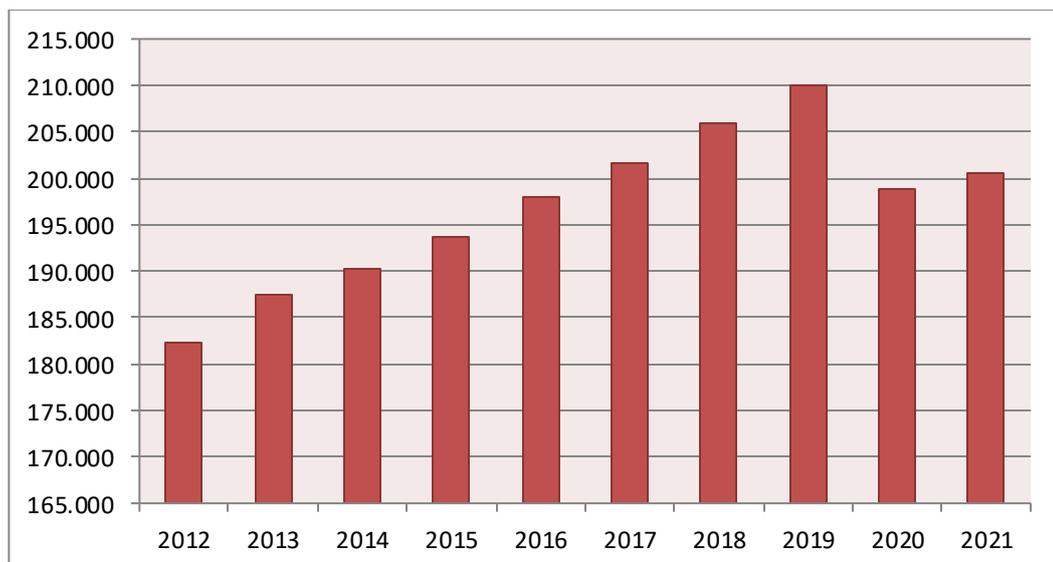
#### **Grafik 4.3 Jumlah Anggaran Pendidikan (Rupiah) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2021**

Berdasarkan Grafik 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah anggaran pendidikan di Kabupaten Aceh Barat mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Anggaran pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 603,33 juta, sedangkan anggaran terendah terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 269,76 juta. Terjadinya fluktuasi pada anggaran pendidikan dikarenakan terjadinya fluktuasi pada APBD

Kabupaten Aceh Barat dari kebijakan pemerintah daerah terhadap biaya penganggaran.

#### 4.2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat

Menurut Badan Pusat statistik (2022), penduduk merupakan semua orang yang berdomisili selama 6 bulan maupun lebih atau mereka yang beromisili kurang dari 6 bulan namun bertujuan untuk menetap. Sedangkan jumlah penduduk adalah keseluruhan jumlah orang yang berdomisili di suatu wilayah. Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk yang ada, akan menambah jumlah angkatan kerja yang tersedia, sehingga akan bertambah pula kebutuhan lapangan pekerjaan yang diperlukan, dampak dari penambahan penduduk ini apabila lowongan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit daripada jumlah orang yang mencari pekerjaan maka akan memicu terjadinya pengangguran. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : Dinas BPKD Kabupaten Aceh Barat (2023)

**Grafik 4.4 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2021**

Berdasarkan data dari grafik di atas dapat diketahui, mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 hampir selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2010 mengalami penurunan terjadi pada tahun 2020. Jumlah penduduk yang tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 210.113 jiwa, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2012, yaitu sebanyak 182.364 jiwa.

### **4.3 Hasil Pengujian Hipotesis**

Untuk mengetahui pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran pendidikan dan jumlah jiwa terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat dan akan dianalisis dengan menggunakan model analisis linear beranda dan diolah dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan penelitian ini, dapat di peroleh hasil akhir sebagai berikut :

#### **4.3.1 Uji Asumsi Klasik**

##### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Jika  $\text{sig.} > 0,05$  maka data berdistribusi dengan normal, jika  $\text{sig.} < 0,05$  maka data tidak berdistribusi secara normal. Adapun alat yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogrof-smirnov*. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,04605169
Most Extreme Differences	Absolute	,146
	Positive	,112
	Negative	-,146
Kolmogorov-Smirnov Z		,462
Asymp. Sig. (2-tailed)		,983

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output Data SPSS (2023)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.3 di atas dengan menggunakan metode *one sample kolmogorov smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen pada jumlah sampel (N) sebesar 10 adalah 0,983. Dengan demikian, data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau  $0,983 > 0,05$  sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolenearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah *multikolinearitas*. Pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk uji *multikolinearitas* pada penelitian ini adalah melihat nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

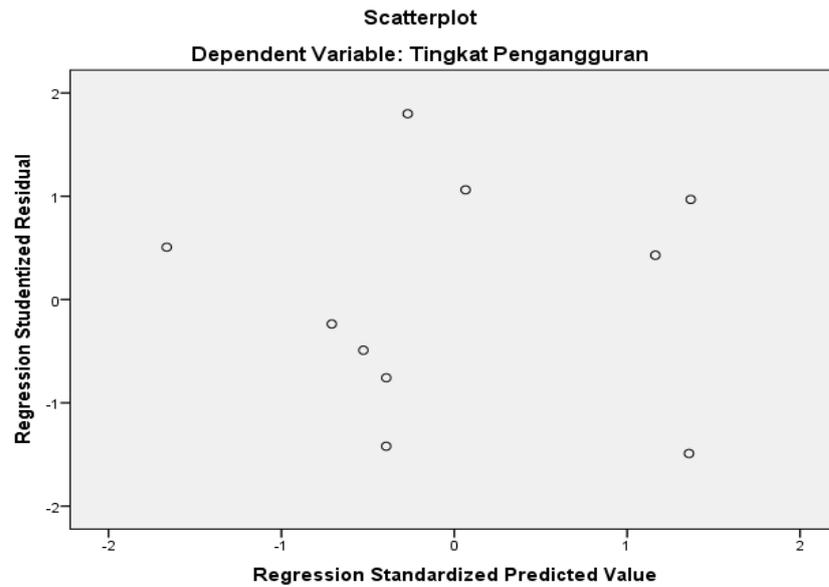
Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
APBD	0,252	3,596	Tidak terjadi multikolinieritas
Anggaran Pendidikan	0,247	3,812	Tidak terjadi multikolinieritas
Jumlah Penduduk	0,677	1,477	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Output Data SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* yang kurang dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* pada suatu periode pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan pola gambar *scatterplot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau angka 0, titik-titik data yang tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, hasil penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil *output* heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Sumber: Output Data SPSS (2023)

**Gambar 4.5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

### 4.3.2 Uji Hipotesis

#### 1. Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,483	6,123		4,562	,043		
1 APBD	,337	,331	,455	5,716	,002	,252	3,596
Anggaran Pendidikan	,157	,435	,266	1,592	,104	,247	3,812
Jumlah Penduduk	,436	1,210	,677	6,848	,001	,677	1,477

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran

Sumber: Output Data SPSS (2023)

Tabel tersebut digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi berikut

ini :

$$TP = \alpha + \beta_1 APBD + \beta_2 APdk + \beta_3 JP + \varepsilon$$

Atau

$$TP = 0,483 + 0,337_{APBD} + 0,157_{APdk} + 0,436_{JP} + \varepsilon$$

Keterangan / interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah :

- a. Konstanta sebesar 0,483 menyatakan bahwa apabila APBD, anggaran pendidikan dan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat dianggap nol (0), maka tingkat pengangguran terbuka sebesar 48,3%.
- b. Koefisien regresi APBD ( $X_1$ ) sebesar 0,337 menyatakan bahwa setiap penambahan 100%, maka APBD akan meningkatkan jumlah tingkat pengangguran terbuka sebesar 33,7 %.
- c. Koefisien regresi anggaran pendidikan ( $X_2$ ) sebesar 0,157 menyatakan bahwa setiap penambahan 100%, maka APBD akan meningkatkan jumlah tingkat pengangguran terbuka sebesar 15,7 %.
- d. Koefisien regresi jumlah penduduk ( $X_3$ ) sebesar 0,436 menyatakan bahwa setiap penambahan 100%, maka APBD akan meningkatkan jumlah tingkat pengangguran terbuka sebesar 43,6%.

## 2. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kontribusi koefisien regresi antara variabel bebas dengan variabel terikat maka digunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ) Apabilanilai koefisien determinasi mendekati 1 maka pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat adalah kuat, apabila ( $R^2$ ) adalah 0 maka tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.6:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Koefisien Adjusted R Square**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,674 <sup>a</sup>	,454	,582	,15640	1,343

a. Predictors: (Constant), APBD, Anggaran Pendidikan, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran

Sumber: Output Data SPSS (2023)

Berdasarkan dari Tabel 4.6 di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh adalah sebesar 0,582. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 58,2% variabel terikat (tingkat pengangguran) telah dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu APBD ( $X_1$ ), anggaran pendidikan ( $X_2$ ), dan jumlah penduduk ( $X_3$ ). Sedangkan sisanya sebesar 41,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum dimasukkan ke dalam variabel penelitian.

### 3. Uji t

Uji t dalam analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh antara variabel APBD ( $X_1$ ), anggaran pendidikan ( $X_2$ ), dan jumlah penduduk ( $X_3$ ) terhadap tingkat pengangguran ( $Y$ ). Kriteria pengujian untuk uji t antara lain:

$H_{a1}$  : Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha$  maka artinya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

$H_{a2}$  : Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha$  maka artinya, anggaran pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

$H_{a3}$  : Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai  $sig < \alpha$  maka artinya, jumlah penduduk secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

Adapun hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,483	6,123		4,562	,043
1 APBD	,337	,331	,455	5,716	,002
Anggaran Pendidikan	,257	,435	,266	1,592	,104
Jumlah Penduduk	,436	1,210	,677	6,848	,001

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran

Sumber: Out Put Data SPSS (2023)

Berdasarkan dari Tabel 4.7 di atas, maka dapat diketahui bahwa:

1) Pengaruh APBD terhadap tingkat pengangguran

Nilai koefisien dari variabel APBD ( $X_1$ ) 0,337, yakni bernilai positif. Hal ini berarti APBD berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,716 > dengan  $t_{tabel}$  1.894 dan nilai sig 0,002 < 0,05, nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significance* ( $\alpha = 0,05$ ). Tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka diterima  $H_1$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara APBD ( $X_1$ ) terhadap tingkat pengangguran ( $Y$ ).

2) Pengaruh anggaran pendidikan terhadap tingkat pengangguran

Nilai koefisien dari variabel anggaran pendidikan ( $X_2$ ) 0,257, yakni bernilai positif. Hal ini berarti anggaran pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,592 < dengan  $t_{tabel}$  1.894 dan nilai sig 0,104 > 0,05, nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari *level of significance* ( $\alpha = 0,05$ ). Tingkat signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka ditolak  $H_2$ . Jadi dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara anggaran pendidikan ( $X_2$ ) terhadap tingkat pengangguran ( $Y$ ).

### 3) Pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran

Nilai koefisien dari variabel jumlah penduduk ( $X_3$ ) 6,848, yakni bernilai positif. Hal ini berarti jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Diketahui nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $6,848 >$  dengan  $t_{tabel}$  1.894 dan nilai sig  $0,001 < 0,05$ , nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significance* ( $\alpha = 0,05$ ). Tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka diterima  $H_3$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk ( $X_3$ ) terhadap tingkat pengangguran ( $Y$ ).

## 4. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Untuk menguji pengaruh APBD ( $X_1$ ), anggaran pendidikan ( $X_2$ ) dan jumlah penduduk ( $X_3$ ) secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran ( $Y$ ), digunakan uji statistik F (uji F). Apabila nilai  $F_{hitung} >$  nilai  $F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sebaliknya apabila nilai  $F_{hitung} <$  nilai  $F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hasil uji bersama-sama dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	17,506	3	5,835	61,666	,000 <sup>b</sup>
Residual	5,525	6	,073		
Total	23,031	9			

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran

b. Predictors: (Constant), APBD, Anggaran Pendidikan, Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 61,666 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Diketahui  $Df_1 = 3$  ( $X_1, X_2, X_3$ ) dan  $Df_2 = 10 - 3 = 7$ , maka nilai  $F_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5% atau 0.05 adalah 4.737. Nilai yang diperoleh lebih kecil dari probabilitas kesalahan yang ditolerir yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima yang artinya variabel bebas APBD ( $X_1$ ), anggaran pendidikan ( $X_2$ ) dan jumlah penduduk ( $X_3$ ) secara serempak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat yakni tingkat pengangguran ( $Y$ ).

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.4.1 Pengaruh Anggaran APBD Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat**

Berdasarkan hasil output dari penelitian variabel APBD berhubungan positif terhadap tingkat Pengangguran dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significance* ( $\alpha = 0,05$ ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun APBD meningkat namun belum bisa mengurangi pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini dikarenakan, APBD yang di anggarankan pemerintah belum cukup efektif & efisien untuk ditribusikan kepada masyarakat kabupaten Aceh Barat. Program- program yang di anggarankan pemerintah belum tepat sasaran, artinya masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan program tersebut, namun belum mendapatkannya sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, untuk memperhatikan lagi distribusi anggaran terhadap program pemerintah yang telah dibuat. Artinya, program tersebut harus ada pengawasan atas kelanjutan panduan yang telah di berikan. Sehingga program tersebut dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang pada

akhirnya akan menentukan atau mengurangi tingkat pengangguran di Aceh Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kaharudin (2019), Rotinsulu, et. Al (2019) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah belum dapat mengurangi pengangguran.

#### **4.4.2 Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat**

Berdasarkan hasil output dari penelitian variabel anggaran pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dengan nilai signifikansi sebesar 0,104, nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari *level of significance* ( $\alpha = 0,05$ ). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Suaidah (2018), yang melakukan penelitian pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jombang. Hal ini sesuai dengan hasil uji t yang mengatakan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Di samping penundaan menerima penghasilan tersebut, orang yang melanjutkan sekolah harus membayar biaya secara langsung seperti uang sekolah, pembelian buku-buku dan alat-alat sekolah. Namun penelitian ini tidak membahas bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah bisa juga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi akan mencari pekerjaan di daerah yang memiliki *leading sector* sesuai dengan pendidikannya, karena hal ini akan lebih leluasa bersaing di daerah lain yang *leading sektor* usaha sesuai pendidikan ditunggu yang dimiliki seorang tersebut. Pemberian pengeluaran anggaran yang tinggi untuk sektor pendidikan tidak dapat menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menekan tingkat pengangguran terbuka. Justru kemungkinan besar akan menambah pengangguran intelektual yang tercipta dari lulusan pendidikan yang kurang siap kerja dan profesional. Hal ini lah yang membuat pengaruh pengeluaran anggaran bidang pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap menekan jumlah pengangguran.

#### **4.4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat**

Berdasarkan hasil output dari penelitian variabel jumlah penduduk berhubungan positif terhadap tingkat Pengangguran dengan nilai signifikansi sebesar 0,001, nilai ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significance* ( $\alpha = 0,05$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, et al (2019) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengangguran terbuka.

Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa disertai dengan proporsi investasi yang lebih besar, mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pengangguran dan menghalangi transformasi struktural dalam angkatan kerja. Semakin besar pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar

jumlah pengangguran. Sektor riil khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kurang berkembang dan berdaya sehingga kurang atau tidak dapat menyerap jumlah pengangguran.

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Aceh Barat dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan, peningkatan yang ada dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk asli Kabupaten Aceh Barat ataupun juga penduduk pendatang dari luar Kabupaten Aceh Barat. Jumlah penduduk yang besar dari Kabupaten Aceh Barat, tentunya akan memberikan sedikit masalah dalam penambahan jumlah pengangguran yang ada, namun dalam hal ini penduduk yang ada di Kabupaten Aceh Barat juga dapat melakukan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan suatu kewirausahaan yang akan memberikan sumber pendapatan kepada penduduk yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini sesuai dengan teori Malthus bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan kebutuhan konsumsi lebih banyak daripada kebutuhan untuk berinvestasi sehingga sumber daya yang ada hanya dialokasikan lebih banyak ke pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi daripada untuk meningkatkan kapital kepada setiap tenaga kerja sehingga akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang lambat di sektor-sektor modern dan meningkatkan pengangguran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel APBD secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. Setiap kenaikan APBD, maka akan meningkatkan pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini menunjukan bahwa APBD belum dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.
2. Variabel anggaran pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat, hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya anggaran pendidikan belum tentu dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.
3. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka akan meningkatkan pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.
4. Secara simultan, APBD, anggaran pendidikan dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat, namun secara parsial anggaran pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disampaikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi antara lain :

1. Disarankan bagi Dinas (BPKD) Kabupaten Aceh Barat agar lebih fokus dalam pengelolaan anggaran APBD supaya dapat memperlancar pencairan anggaran untuk teknis guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan peningkatan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan sehingga demikian penyerapan tenaga kerja pun lebih meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan cara menciptakan dan menggunakan sumber-sumber ekonomi dengan baik, dan memperluas penyerapan tenaga kerja dengan menciptakan lapangan kerja, sehingga masyarakat di Aceh Barat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
2. Bagi penelitian berikutnya adalah dapat menganalisis APBD, anggaran pendidikan dan jumlah penduduk yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat dengan faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUATAKA

- Abdullah, S. 2018. *Penggaran Pemerintah Daerah Regulasi, Teori dan Praktik*. Banda Aceh: Aceh Media Grafika
- Ali, Karnila, Ningsih, Nur Wahyu. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15.1: 85-101.
- Armida. 2014. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astuti, I. Y., Istiyani, N., & Yuliati, L. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 52-62.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Jumlah Angka Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Aceh Barat*. Aceh Barat: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Jumlah Angka Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Aceh Barat 2020*. Aceh Barat: BPS
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. *Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka, Tahun 2023*. Aceh Barat: BPS
- Fauziah Lamaya, Nuraini nona Mei. 2021. Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dikabupaten Flores Timur. Fakultas Ekonomi, *Universitas Muhammadiyah Kupang. Jurnal Akuntansi Vol 8 No 2*.
- Franita, R. 2016. *Analisis Pengangguran di Indonesia*. Sumatra: Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Karianga, H. 2017. *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Erah Otonomi Daerah*. Jakarta: Prenada Media.
- Ishak, Khodijah. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Indonesia. Jakarta: *Unirversitas STIE Syariah Bengkalis. Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 7 No 1*.
- Kaharudin, R., Kumenaung, A. G., & Niode, A. O. 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).

- Kartiwa, A. 2016. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khusnai. 2018. *Keungan Daerah*. Jawa Timur: Universitas Brawijaya Press
- Kusreni dan Suhab. 2019. Kebijakan Apbd Dan Kesehhateraan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Selatan. Surabaya: *Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Dan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin, Makasar. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen Vol. 5 No 3*
- Chodariyanti, L. 2016. Analisis Kebutuhan Fiskal Dan Kapasitas Fiskal Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013. *Jurnal Ekbis, 14(2)*, 677-689.
- Lamaya, F., & Mei, N. N. 2021. Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang, 8(2)*, 43-49.
- Nurhidayah dan Hendikawati. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublis.
- Nurulita, S., Arifulsyah, H., & Yefni, Y. 2018. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau. *Jurnal Benefita, 3(3)*, 336-356.
- PP No. 58. 2005. Peraturan Pemerintah No. 58 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PP No. 105. 2000. Peraturan Pemerintah No. 105 2000 Tentang pertanggung jawaban keuangan daerah.
- PP No.13. 2006. Peraturan pemerintah No. 33. 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Rotinsulu, D. C., Tenda, A. R., & Leonufina, L. M. 2019. Analisis Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 18(3)*.
- Rusfandi, R. 2019. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Santoso. 2021. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Saraswati. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktifitas Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol 2 No 3
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. 2018. Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah

- Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Suaidah, I. 2018. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. 2013. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suliyanto. 2016. *Ekonometrika Trepan Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suparmoko. 2014. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suprato, W. 2016. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi, Jakarta*.
- Wulandari dan Iryanie 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan “. *E-Journal Universitas Andi Djemma*. Vol.2, No.2.
- Yasin, et. Al, 2017. Analisis Pengaruh Struktur APBD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten dan Kota se Jawa Timur. Surabaya: *Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 2 No 2*.
- Zakaria, I. T. A. 2018. *Analisis Pengaruh APBD dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Zulhanafi. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktifitas Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol 2 No 3.

## Lampiran 1

### Data Input Penelitian Asli Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat

No	Tahun	Jumlah APBD (M)	Anggaran Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pengangguran (Jiwa)
1	2012	566,75	269,76	182.364	7872
2	2013	1.771,26	603,33	187.459	9342
3	2014	987,28	334,83	190.244	8987
4	2015	791,48	398,87	193.791	8878
5	2016	1.296,82	461,04	197921	8823
6	2017	1.350,73	507,68	201.682	6913
7	2018	1.251,73	422,31	205.971	7046
8	2019	1.422,57	572,21	210.113	6909
9	2020	1.441,45	582,81	198.736	6345
10	2021	1.356,18	508,45	200.579	6777

Sumber : Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat Dan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat (2022).

## Lampiran 2

### Data Input Penelitian (Log) Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat

No	Tahun	Jumlah APBD	Anggaran Pendidikan	Jumlah Penduduk	Pengangguran
1	2012	2,75	2,43	5,26	3,9
2	2013	3,25	2,78	5,27	3,97
3	2014	2,99	2,52	5,28	3,95
4	2015	2,9	2,6	5,29	3,95
5	2016	3,11	2,66	5,3	3,95
6	2017	3,13	2,71	5,3	3,84
7	2018	3,1	2,63	5,31	3,85
8	2019	3,15	2,76	5,32	3,84
9	2020	3,16	2,77	5,3	3,8
10	2021	3,13	2,71	5,3	3,83

Sumber : Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat Dan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat (2022).

## Lampiran 3

## OUT PUT DATA SPSS

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	APBD, Anggaran Penddikan, Jumlah Penduduk <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran

b. All requested variables entered.

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,674 <sup>a</sup>	,454	,582	,15640	1,343

a. Predictors: (Constant), APBD, Anggaran Penddikan, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17,506	3	5,835	61,666	,000 <sup>b</sup>
	Residual	5,525	6	,073		
	Total	23,031	9			

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran

b. Predictors: (Constant), APBD, Anggaran Penddikan, Jumlah Penduduk

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,483	6,123		4,562	,043		
	APBD	,337	,331	,455	5,716	,002	,252	3,596
	Anggaran Penddikan	,157	,435	,266	1,592	,104	,247	3,812
	Jumlah Penduduk	,436	1,210	,677	6,848	,001	,677	1,477

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran

Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	LogX1	LogX2	LogX3
1	1	3,998	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,002	48,634	,00	,06	,03	,00
	3	,000	167,477	,00	,94	,94	,00
	4	4,053E-006	993,210	1,00	,01	,03	1,00

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran

Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3,8175	3,9449	3,8875	,04204	10
Std. Predicted Value	-1,663	1,368	,000	1,000	10
Standard Error of Predicted Value	,020	,050	,034	,011	10
Adjusted Predicted Value	3,8021	4,0419	3,8812	,06721	10
Residual	-,06847	,07219	,00000	,04605	10
Std. Residual	-1,214	1,280	,000	,816	10
Stud. Residual	-1,490	1,799	,037	1,097	10
Deleted Residual	-,14586	,14257	,00625	,09057	10
Stud. Deleted Residual	-1,715	2,419	,062	1,271	10
Mahal. Distance	,258	6,144	2,700	2,044	10
Cook's Distance	,010	1,117	,312	,429	10
Centered Leverage Value	,029	,683	,300	,227	10

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran

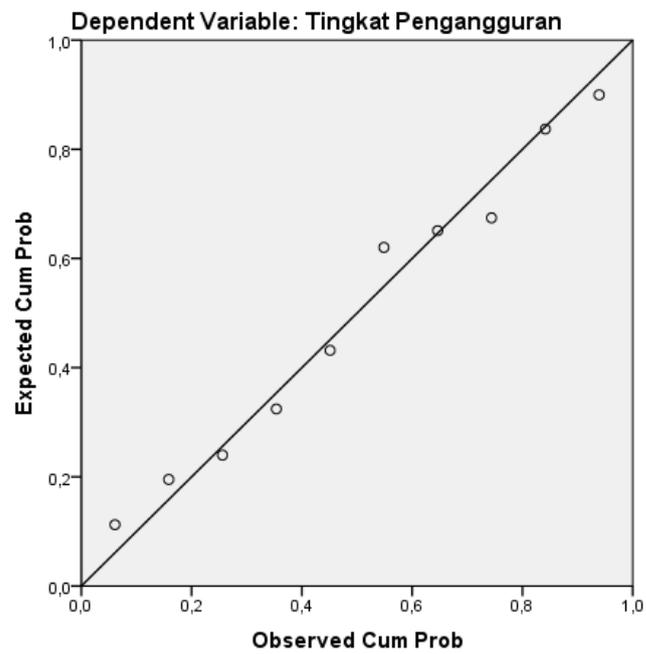
## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,04605169
Most Extreme Differences	Absolute	,146
	Positive	,112
	Negative	-,146
Kolmogorov-Smirnov Z		,462
Asymp. Sig. (2-tailed)		,983

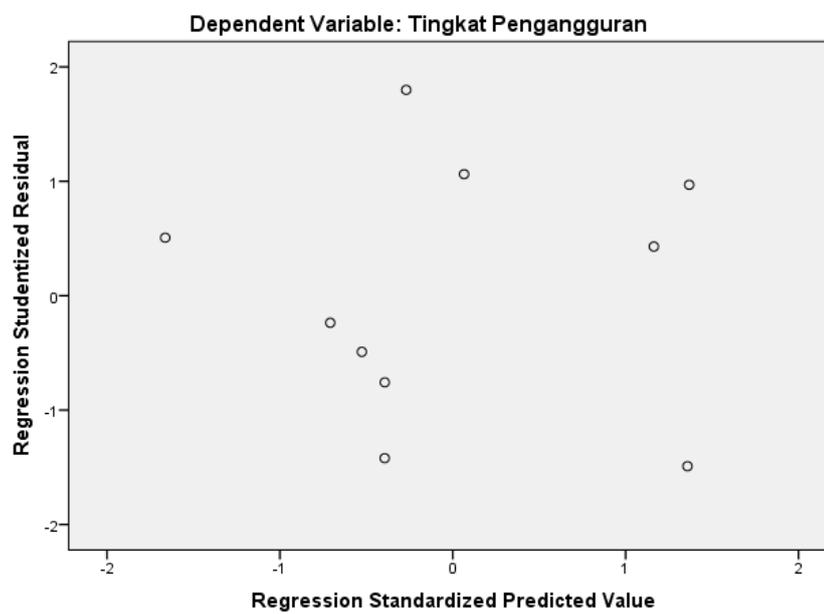
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



**Lampiran 4****FOTO PENELITIAN**

Foto 1: Pengambilan Data Penelitian di Dinas BPKD Kabupaten Aceh Barat



Foto 2: Pengambilan Data Penelitian di Dinas BPKD Kabupaten Aceh Barat

## Lampiran 5

Tabel Uji T

df	Pr 0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710

## Lampiran 6

Tabel Uji F

$\alpha = 0,05$	$df_1=(k-1)$							
$df_2=(n-k)$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.44	199.500	215.70	224.583	230.162	233.98	236.768	238.883
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687	3.581	3.500	3.438
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.790	2.707	2.641
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810	2.699	2.614	2.548
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773	2.661	2.577	2.510
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740	2.628	2.544	2.477
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685	2.573	2.488	2.420
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640	2.528	2.442	2.375
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.490	2.405	2.337
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587	2.474	2.388	2.321
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572	2.459	2.373	2.305
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558	2.445	2.359	2.291
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545	2.432	2.346	2.278
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534	2.421	2.334	2.266
31	4.160	3.305	2.911	2.679	2.523	2.409	2.323	2.255
32	4.149	3.295	2.901	2.668	2.512	2.399	2.313	2.244
33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503	2.389	2.303	2.235
34	4.130	3.276	2.883	2.650	2.494	2.380	2.294	2.225
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485	2.372	2.285	2.217
36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477	2.364	2.277	2.209
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.470	2.356	2.270	2.201
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463	2.349	2.262	2.194
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456	2.342	2.255	2.187
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449	2.336	2.249	2.180
41	4.079	3.226	2.833	2.600	2.443	2.330	2.243	2.174
42	4.073	3.220	2.827	2.594	2.438	2.324	2.237	2.168
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432	2.318	2.232	2.163
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427	2.313	2.226	2.157
45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422	2.308	2.221	2.152
46	4.052	3.200	2.807	2.574	2.417	2.304	2.216	2.147
47	4.047	3.195	2.802	2.570	2.413	2.299	2.212	2.143
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409	2.295	2.207	2.138
49	4.038	3.187	2.794	2.561	2.404	2.290	2.203	2.134
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400	2.286	2.199	2.130
51	4.030	3.179	2.786	2.553	2.397	2.283	2.195	2.126